



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran TNI Angkatan Laut dalam Perkuatan Ketahanan Maritim Indonesia: Pengamanan IKN dari ancaman di ALKI II

Hendriman Putra¹

¹TNI Angkatan Laut, Indonesia, hendrimanp01@gmail.com.

Corresponding Author: hendrimanp01@gmail.com¹

Abstract: *The transfer of IKN has implications for changes in military geography and the character of threats and the need to adjust national defense strategies. Maritime defense in the effort to move the capital city to Kalimantan is a comprehensive and sustainable effort to regulate and manage the space of the jurisdiction of the Republic of Indonesia. The challenge that arises is how the Indonesian Navy carries out its defense functions, upholding the law and maintaining national maritime security. The aim of the research is to describe and analyze the role of the Indonesian Navy, especially in securing IKN from threats at ALKI II. The type of research used is qualitative. Data was collected using interviews, observations, documentation and literature study. Data analysis uses Grouping the data according to key constructs, Identifying bases for interpretation. Research findings show that the Indonesian Navy has three roles, namely the military role, the police role, the diplomatic role and the support role. The military's role is carried out through security and law enforcement, especially directly with the Indonesian Archipelagic Sea Lane (ALKI) II. The police's role is carried out by anticipating traditional and non-traditional threats to be able to provide security guarantees for foreign ships passing through the ALKI II area. The Indonesian Navy's diplomatic role is carried out through cooperative diplomacy, maritime diplomacy and coercive maritime diplomacy. The Indonesian Navy's support role is carried out through base support consisting of Rebase, Replenishment, Repair, Rest and Recreation.*

Keyword: *Maritime defense, IKN, Role of the Indonesian Navy, ALKI II*

Abstrak: Pemindahan IKN berimplikasi pada perubahan geografi militer dan karakter ancaman dan perlunya penyesuaian strategi pertahanan nasional. Pertahanan maritim dalam upaya pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan sebuah upaya komprehensif dan berkelanjutan pada pengaturan dan pengelolaan ruang wilayah yurisdiksi NKRI. Tantangan yang muncul adalah bagaimana TNI AL menjalankan fungsi pertahanan, menegakan hukum dan menjaga keamanan laut yurisdiksi nasional. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran TNI Angkatan Laut khususnya dalam Pengamanan IKN dari ancaman di ALKI II. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan Wawancara, Pengamatan/Observasi, Dokumentasi dan studi Kepustakaan. Analisis data menggunakan *Grouping the data according to key constructs, Identifying bases for interpretation*. Temuan penelitian menunjukkan TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil, peran diplomasi dan peran dukungan.

Peran militer dilakukan melalui pengamanan dan penegakan hukum khususnya pada langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Peran Polisionil dilakukan melalui antisipasi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional untuk mampu memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal asing yang melintas di wilayah ALKI II. Peran Diplomasi TNI AL dilakukan melalui diplomasi kooperatif, diplomasi maritim dan diplomasi maritim koersif. Peran Dukungan TNI AL dilakukan melalui dukungan pangkalan yang terdiri *Rebase, Replenishment, Repair, Rest and Recreation*.

Kata Kunci: Pertahanan maritim, IKN, Peran TNI Angkatan Laut, ALKI II

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki lebar perairan 6,4 juta km² dengan garis pantai yang mencapai 108.000 km serta Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 200 mil laut dengan luas 3 juta km². Kondisi tersebut merupakan privilege yang didapatkan berdasarkan aturan yang berlaku sesuai *United Nations Conventions on the Law of the Sea* 1982, sehingga Indonesia diakui sebagai negara kepulauan dan maritim. Namun keuntungan tersebut menimbulkan ancaman dan gangguan yang bisa berdampak pada kondisi keamanan maritim Indonesia (Chadhafi, 2021a). Salah satu fakta yang menandakan kemunculan potensi ancaman dan gangguan adalah posisi geografis yang strategis menjadikan Indonesia sebagai *Centre of Gravity* (CoG) dan *The Global Supply Chain System* (Chadhafi, 2021b). Oleh karena itu, salah satu langkah penting yang harus disiapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah melaksanakan perkuatan pertahanan maritim di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), khususnya di ALKI II seiring dengan kepindahan Ibukota Negara Indonesia dari DKI Jakarta menuju Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Pemindahan Ibukota negara membutuhkan penyiapan yang sangat matang, dimana seluruh aspek harus menjadi perhatian yang tidak boleh dikesampingkan, seperti kondisi perekonomian, sosial budaya, kondisi geografis wilayah dan kondisi geopolitik yang ada di level regional maupun nasional. Hal ini tidak lepas dari peran penting Ibukota negara dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana seluruh sendi-sendi kehidupan bernegara akan sangat bergantung pada kelancaran Pemerintah dalam memimpin bekerja. Sehingga harus dipastikan kondisi pertahanan dan keamanan di lingkungan Ibukota negara dalam keamanan aman. Indonesia bukan menjadi satu-satunya negara yang memindahkan Ibukota, karena berdasarkan data terdapat negara-negara lain yang memindahkan Ibukota negaranya dengan mempertimbangkan faktor Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk (Ishenda & Guoqing, 2019). Selain itu, terdapat beberapa tipologi lainnya yang menyebabkan pemindahan ibukota negara, yaitu: (1) tujuan pembangunan atau penguatan identitas bangsa; (2) penyebaran pembangunan daerah; (3) masalah kompleks yang dihadapi oleh ibukota sebelumnya; (4) untuk mengurangi atau meredam ancaman pemberontakan; dan (5) subjektivitas keputusan pemimpin negara tersebut (Illmann, 2015).

Tipologi tersebut sudah pernah dilaksanakan oleh beberapa negara di dunia, dimana pemerintah negara Nigeria, Jerman, Turki, Pakistan, Kazakhtan, Tanzania dan Malaysia memilih untuk memindahkan ibukota negara sebagai bentuk penguatan identitas. Kemudian Malawi dan Korea Selatan menggunakan alasan agar dapat mengatasi ketertinggalan pembangunan daerah. Namun terdapat negara yang memiliki lebih dari satu alasan ketika memutuskan untuk memindahkan Ibukota negaranya, seperti Brazil dan Belize yang memiliki alasan untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan daerah dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Ibukota negara lama. Sedangkan Rusia, India dan Myanmar memilih untuk memindahkan Ibukota negara dengan alasan menghindari pemberontakan serta mempertimbangkan keamanan negara (Illmann, 2015). Namun Pemerintah Indonesia memiliki

banyak pertimbangan untuk memindahkan Ibukota Negara dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur, yaitu (Purnama & Chotib, 2023):

1. Populasi penduduk di Pulau Jawa mencapai 151,59 juta (56,10%) dari total populasi penduduk Indonesia, dimana kependudukan Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa;
2. Dominasi PDB di Jawa mencapai 57,89% dari PDB nasional di tahun 2021;
3. Krisis ketersediaan air bersih di Jawa;
4. Pertumbuhan urbanisasi di Jawa sangat *massive*, hal ini dapat dilihat dari kondisi Kawasan di sekitar DKI Jakarta yang penduduknya mencapai 32 juta jiwa; dan
5. Potensi kerawanan lingkungan yang ada di DKI Jakarta, seperti banjir, longsor, abrasi laut, polusi yang sangat tinggi di sungai maupun jalanan sebagai dampak dari kemacetan lalu lintas.

Pro dan kontra selalu menjadi bahan diskusi yang tidak pernah menemui titik terang karena perkembangan informasi dan opini publik menjadi salah satu bentuk respon dari masyarakat untuk menanggapi keinginan Pemerintah Indonesia memindahkan Ibukota Negara. Namun sebagai negara berkembang yang selalu memiliki keinginan untuk meningkatkan potensinya, maka Pemerintah Indonesia juga tidak lupa untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat proses perpindahan Ibukota negara menuju IKN di Kalimantan Timur. Secara konstelasi geografis, posisi Kalimantan Timur dekat ALKI II yang banyak dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing, baik untuk transit maupun melaksanakan aktivitas lainnya. Berdasarkan UNCLOS 1982, kapal maupun pesawat udara asing diizinkan untuk melalui ALKI dengan cara normal untuk transit secara terus-menerus, langsung dan secepat-cepatnya sesuai dengan aturan hak lintas tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesia. Bahkan Kapal Selam negara asing juga diizinkan untuk melewati ALKI dengan posisi "*normal mode*", yaitu berada dalam laut dan tidak muncul di permukaan air. Sehingga hal tersebut telah memunculkan konsekuensi logis bahwa akan hadir peluang datangnya ancaman yang akan mengganggu stabilitas keamanan Ibukota Negara melalui ALKI II karena ALKI merupakan jalur perdagangan dan transportasi internasional yang memegang peran penting bagi komoditi perekonomian nasional, regional dan global (Listiyono et al., 2019).

Pemindahan IKN berimplikasi pada perubahan geografi militer dan karakter ancaman yang meniscayakan adanya penyesuaian strategi pertahanan nasional. Berbeda dari Jakarta yang terletak di Pulau Jawa, Nusantara tidak berlokasi di pinggir pantai dan terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Pemindahan IKN juga menantang relevansi pembangunan pertahanan yang selama ini berpusat di pulau Jawa dan wilayah selatan Indonesia. Namun, Nusantara yang akan dibangun dari nol, memungkinkan integrasi perencanaan pertahanan dengan tata kota dilakukan secara optimal. Sehingga perlu adanya kesiapan dan antisipasi dari semua elemen yang terlibat, baik pemerintah, pakar, maupun media yang berperan penting dalam membangun persepsi dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman yang dihadapi sesuai karakteristik wilayah tersebut. Hal ini karena masyarakat merupakan aktor yang memainkan peran penting dalam pertahanan dan keamanan nasional atau yang lebih kita kenal dengan system pertahanan rakyat semesta (*sishankamrata*). (Saputra & Halkis, 2021)

Isu keamanan maritim menjadi salah satu bagian dari dampak pergeseran paradigma ancaman yang telah menghadirkan spektrum militer dan nirmiliter, sehingga saat ini keamanan maritim sudah tidak bisa lagi dinilai dari komposisi kekuatan militernya. Pertahanan maritim dalam upaya pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan sebuah rangkaian upaya yang komprehensif dan berkelanjutan tentang pengaturan dan pengelolaan ruang wilayah yurisdiksi NKRI sebagai negara kepulauan bercirikan Nusantara, yang mengedepankan aspek kemaritiman, dengan cakupan ruang darat, ruang laut dan ruang udara sebagai suatu kesatuan

secara holistik, terhadap seluruh kemampuan dan kekuatan dari sistem pertahanan negara, yang ditata secara tepat dan bijaksana sehingga berdaya guna dan berhasil guna untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI (Hasan & Haeran, 2023). Pertahanan maritim adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara melalui wilayah kelautannya. (Santya Putra, 2020)

Oleh karena itu, diperlukan sinergitas yang sangat kuat dari seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan untuk mendukung TNI Angkatan selaku komponen utama pertahanan negara dalam menjaga stabilitas ketahanan maritim Indonesia guna mengamankan IKN dari ancaman yang ada di ALKI II. Tantangan yang muncul adalah bagaimana TNI khususnya AL menjalankan fungsinya di bidang pertahanan, menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, serta melakukan diplomasi angkatan laut berkaitan dengan Pemindahan Ibu Kota Negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini secara lebih luas bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Peran TNI Angkatan Laut khususnya dalam Pengamanan IKN dari ancaman di ALKI II.

METODE

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian secara utuh dan mendalam, maka jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif (*qualitative research*). Teknik Pengumpulan Data pada Penelitian ini meliputi: Wawancara, Pengamatan/Observasi, Dokumentasi dan studi Kepustakaan. Informan dalam penelitian meliputi pejabat berwenang yang ditentukan secara berkelanjutan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan teknik yang dikembangkan, yaitu *Grouping the data according to key constructs, Identifying bases for interpretation, Developing generalizations from the data, Testing Alternative interpretations dan Forming and/ or refining generalizable theory from case study*. (McNabb, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan maritim adalah salah satu isu keamanan kawasan yang menonjol dan mendapat perhatian pada abad ke-21 bersamaan dengan fungsi strategis wilayah dalam kepentingan negara-negara di dunia untuk meningkatkan keamanan. Hal ini berkaitan dengan wilayah maritim sebagai urat nadi utama interaksi ekonomi global sehingga keamanan maritim merupakan isu krusial bagi banyak negara di dunia (Suproboningrum, 2018). Secara substansial keamanan maritim adalah bagian dari keamanan nasional suatu negara yang menggambarkan wilayah maritim yang bebas dari segala bentuk ancaman baik ancaman tradisional atau ancaman non-tradisional yang mengancam kedaulatan negara dan mengganggu terwujudnya kepentingan nasional (Febiana & Burhanuddin, 2024). *Maritime security* sebagai sebuah keadaan tidak adanya ancaman-ancaman maritim seperti sengketa antar-negara, terorisme maritim, pembajakan, perdagangan manusia dan narkoba, penyeludupan senjata, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), masalah lingkungan, kecelakaan maritim hingga wabah penyakit. Ada lima perspektif alternatif dalam *maritime security*, yakni *security of the sea itself, ocean governance, maritime border protection, military activities at sea* dan *security regulation of the maritime transportation system*. (Bueger, 2015)

Sebagaimana Angkatan laut di Negara-negara lain, TNI AL memiliki tiga peran yang universal yaitu; peran militer, peran diplomasi dan peran polisionil (Booth, 2014). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan, menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, serta melakukan diplomasi angkatan laut. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut dituntut untuk mampu melaksanakan peran dan tugasnya secara maksimal dalam rangka menegakan kedaulatan dan

hukum diwilayah laut. Ketiga peran tersebut dipraktekkan oleh TNI AL dalam mengamankan Perairan Indonesia. TNI Angkatan Laut sebagai bagian integral dari TNI, berperan sebagai komponen utama pertahanan negara matra laut menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara guna menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD.

Peran Militer (*Military/Defence*) TNI AL dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer dari negara lain yang melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga. Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur berada dalam zona pertahanan banyak negara. Kemungkinan perang terbuka memang sangat kecil, akan tetapi ada ancaman lain terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia saat berpindah ibu kota. Posisi IKN yang berbatasan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan *choke point* atau titik sempit dunia. Sedangkan di sisi udara, lokasi IKN mendekati *Flight Information Region* (FIR) milik Negara tetangga, seperti Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina. Selain itu, ibu kota negara baru ada dalam radius jelajah ICBM (*Intercontinental Ballistic Missile*) dan rudal hipersonik negara tertentu. Ancaman lainnya adalah saat ini pulau Kalimantan merupakan lokasi dan jalur *trans-nation crime*, seperti penyelundupan orang, narkoba, dan sebagainya. IKN juga berdekatan dengan *terrorist transit triangle* di Sulu, Sabah, dan Poso. Kemudian, posisi ibu kota negara baru dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti FPDA (*The Five Power Defence Arrangements*) Malaysia dan sebagainya, kemudian Aliansi AUKUS Australia, UK, dan USA, dan terdampak dari *one belt one road* (OBOR) BRI China. (Mutia et al., 2024)

Sistem pertahanan maritim sangat penting menjadi prioritas utama dalam setiap pemindahan ibu kota negara. Sampai saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dari segi sistem pertahanan maritim Indonesia memang masih lemah, termasuk pada ibu kota negara baru di Kalimantan. Salah satu peran TNI AL dalam menghadapi ancaman tersebut dengan menggelar operasi rutin dan terkoordinasi yang bertujuan untuk mengantisipasi pelanggaran laut di wilayah Indonesia khususnya di wilayah wilayah IKN Nusantara. TNI AL dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasal 9 huruf a dan b yaitu melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan dan menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Berdasarkan hal tersebut TNI Angkatan laut dituntut kesiapan KRI selama 24 jam dan 7 hari dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia. Guna menjamin berjalannya proses perpindahan pemerintahan dari Jakarta menuju Ibu Kota Negara, maka TNI AL ikut mengambil peran berupa optimalisasi pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keamanan dilaut serta menjadikannya sebagai titik tolak Indonesia dalam rangka mencapai visi yang dimaksud. Peran TNI AL menjadi sangat penting, karena salah satu tugas TNI AL adalah melaksanakan penegakkan kedaulatan di wilayah perairan NKRI serta melaksanakan penegakan hukum dan jaminan keselamatan di laut Indonesia.

Peran Polisionil (*constabulary role*) dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, dari segala tindak pidana di laut serta mendukung pembangunan nasional bangsa Indonesia dalam hal ini memberikan suatu kontribusi terhadap stabilitas negara dan pembangunan nasional. TNI AL merupakan salah satu bagian utama dari sistem pertahanan negara Indonesia di wilayah perairan yang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara serta integritas wilayah NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Adapun konsepsi dasar terhadap perwujudan keamanan

di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang saling berkaitan satu dengan lainnya

Peran Polisionil (*Constabulary*) ini dilakukan mengingat letak IKN di Kalimantan Timur tersebut berdekatan dengan garis batas internasional, dalam hal ini relatif dekat dengan batas darat negara Malaysia bagian timur sepanjang 2.062 km. Menurut Andersen dalam catatannya pada buku *Geopolitics, Geography and Strategy*, garis batas internasional berpotensi menjadi tempat pertemuan militer antar-negara yang biasanya berkaitan dengan perebutan wilayah territorial (Gray & Sloan, 2014). Posisi Ibukota Nusantara juga berhimpit dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yaitu Selat Makasar. Wilayah ALKI II relatif aman untuk pelayaran, tapi terdapat potensi bahaya akibat imbas konflik Blok Ambalat, yaitu kekhawatiran dimanfaatkannya wilayah ALKI II untuk kepentingan militer angkatan perang negara lain. Ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional menjadi sebuah tantangan bagi TNI AL sebagai penegak hukum di laut yang dituntut untuk mampu memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal asing yang melintas di wilayah ALKI II. TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut berpegang pada doktrin sebagai landasan strategi dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini untuk menghadapi ancaman terhadap aspek kelautan dan menciptakan situasi laut yang aman terkendali di wilayah yurisdiksi nasional. Dalam rangka menjamin keamanan maritim di kawasan ALKI II, TNI melaksanakan operasi Garda Samudera-21 yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Panglima Koarmada II sebagai Pangkogasgab Pam ALKI II yang merupakan kegiatan operasi dibawah Mabes TNI yang dilaksanakan sepanjang tahun. Selanjutnya, Pabandya-1/Siapopsdagri Paban IV/Opsdagri Sops TNI menambahkan terkait Sarana dan Prasarana TNI yang meliputi area tugas ALKI II. ALKI II terletak di antara pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi di sisi utara mulai Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. Disepanjang ALKI II terdapat beberapa sarana TNI yang sudah tergelar. (Mutia et al., 2024)

Lokasi IKN sangat rentan terhadap ancaman maupun konflik kepentingan antar negara. Hal ini mengingat posisi IKN yang dekat dengan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia juga akan dihadapkan pada permasalahan terkait dengan wilayah territorial maritim. IKN memiliki posisi penting dalam konteks pertahanan laut, sebab posisinya yang berada di pusat jaringan pelayaran dan logistik regional serta dapat menjadi jalur penggerakan kekuatan bagi negara-negara seteru. Peran penting bagi TNI AL sebagai komponen utama keamanan laut untuk bergerak adaptif dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai komponen lainnya, terutama ketika dihadapkan dengan berbagai teknologi peperangan yang kini mulai bergeser dari *hard war* ke *soft war* sebagai implementasi konsep smart defence. Smart defense adalah pertahanan ibu kota yang berbasis teknologi, diplomasi, dan kearifan lokal yang terintegrasi sebagai bagian dari Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh komponen dan sumber daya nasional. Selain itu *Smart defense* merupakan kombinasi dari *hard defense* dan *soft defense*, dimana *hard defense* bersifat teknologi deepening yang artinya Alutsista nanti akan menggunakan teknologi canggih sedangkan *soft defense* akan memberdayakan *local wisdom*. Dalam pembangunan IKN, pemerintah Indonesia berencana untuk memperkenalkan sistem pertahanan dan keamanan yang lebih modern dan terintegrasi dengan teknologi canggih. Salah satu konsep yang dipertimbangkan untuk sistem pertahanan dan keamanan IKN adalah "*Smart Defense System*".

Peran Diplomasi (*diplomacy role*) merupakan penggunaan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijaksanaan politik luar negeri pemerintah Indonesia, dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan suatu negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan (Herlambang Suryo Putro, 2022). Dalam rangka menjalankan tugas, TNI AL dapat meningkatkan hubungan kerja sama keamanan maritim dengan institusi yang bergerak di bidang kelautan. Kerja sama membangun sistem pengamanan dan penegakan hukum dengan membangun sinergis antar institusi terkait, sehingga keamanan di perairan yurisdiksi nasional dapat tercapai dengan baik. Terpadunya

sistem pengawasan, pemantauan atau pengamatan aktivitas kelautan di seluruh wilayah Indonesia, sangat mendukung ketepatan, kecepatan pencegahan dan penindakan terhadap setiap adanya pelanggaran di laut. Dalam menunjang peran TNI AL dalam mewujudkan Perkuatan Ketahanan Maritim Indonesia maka perlu dilakukan diplomasi maritim dimana diplomasi ini merupakan salah satu bentuk diplomasi militer yang diperankan oleh TNI AL. Diharapkan dengan adanya diplomasi maritim dapat menumbuhkan saling percaya antar negara. Dimana berbagai kegiatan yang dilaksanakan mampu mengurangi intensitas pelanggaran di laut yurisdiksi nasional Indonesia seperti pelanggaran kedaulatan, pencurian ikan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut.

Peran diplomasi yang dilakukan TNI AL diplomasi kooperatif meliputi misi seperti kunjungan pelabuhan, latihan bersama atau operasi keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Kegiatan yang dilakukan dalam diplomasi kooperatif ini dimaksudkan untuk membangun pengaruh diplomatik dan memperkuat aliansi maupun membangun kepercayaan di antara negara (Le Mière, 2014). Kedua adalah bentuk diplomasi maritim adalah diplomasi persuasif yang bertujuan untuk meningkatkan pengakuan kekuatan maritim dan membangun kewibawaan bangsa di panggung internasional. Tujuan utamanya adalah untuk menanamkan rasa kehadiran kekuatan maritime tanpa mempengaruhi kebijakan aktor lain. Ketiga, diplomasi maritim koersif yang dapat didefinisikan sebagai bentuk terbuka dalam menunjukkan ancaman atau penggunaan kekuatan laut oleh aktor negara atau non-negara yang dirancang untuk memaksa lawan mundur atau sebagai gertakan dalam mencapai tujuan politik. Bentuk ini menjadi salah satu tren terbaru diplomasi maritim dengan penggunaan kekuatan militer. Disini peran Angkatan Laut, penjaga pantai (*coasts guard*) dan semua kekuatan laut dipakai negara untuk kepentingan operasi dan diplomasi maritim. Strategi ini mengungkapkan dua fitur penting yaitu menjamin keselamatan maritim dan memungkinkan untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang ada dalam bentuk-bentuk diplomasi maritim akan berusaha untuk membangun pengaruh baik, koalisi atau aliansi, dan keyakinan.

TNI Angkatan Laut (TNI AL) Indonesia juga menempati posisi dan porsi yang strategis untuk mengupayakan optimalnya implementasi visi maritim. Melakukan operasi dengan dukungan peralatan Alutsista yang canggih akan mempercepat pengawalan bagi pemerintah mencapai visi tersebut, memberikan gambaran bagi negara lain dan membangun pelaksanaan diplomasi (*naval diplomacy*) secara efektif. Penggunaan aset militer dalam diplomasi maritim menyebutkan bahwa diplomasi yang dimaksud adalah menggunakan kekuatan angkatan laut (*Naval Diplomacy*) sebagai bagian dari diplomasi maritim yang dilakukan dengan sebagai unjuk kekuatan (*naval present*) melalui tindakan *coersive*, *picture building* dan *coalition building* (Till, 2013). Pada Pasal 9 UU No. 34/2004, Penggunaan aset militer dalam diplomasi maritim Indonesia dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut sebagai salah satu komponen utama pertahanan negara yang selain memiliki tugas di bidang pertahanan dan keamanan di laut, juga melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah (Prasetyo et al., 2019).

Peran dukungan ditunjukkan dengan adanya Pangkalan TNI AL yang operasi laut yang diselenggarakan oleh TNI AL maupun TNI tidak akan dapat berjalan optimal tanpa diimbangi oleh pemenuhan aspek dukungan yang memadai. Karena itu untuk menempatkan kedudukan Pangkalan secara proporsional, maka tugas dan fungsi pangkalan sebagai tempat pemangkalan, pembekalan, penyelenggaraan dan pemeliharaan serta perbaikan unsur-unsur operasional TNI AL dan perawatan personil harus mampu mendukung dengan baik. Kemampuan dukungan ini biasa dikenal dengan fungsi `5R` yaitu *Rebase*, *Replenishment*, *Repair*, *Rest and Recreation* harus terus ditingkatkan kemampuannya,” ujarnya. Pangkalan TNI AL yang ideal seharusnya mampu menyediakan 5 R tersebut agar operasional Unsur atau KRI tidak terganggu. dukungan yang diberikan TNI AL dalam mengawal proses pembangunan IKN itu dilakukan dengan memperkuat pangkalan yang berada di sekitar lokasi. TNI Angkatan laut mengerahkan seluruh

kemampuan armada KRI dalam melaksanakan tugas pokok untuk menjaga kedaulatan NKRI. Dalam pelaksanaan tugasnya KRI yang operasikan sering mengalami kerusakan karena kekurangan fasilitas *maintenance, repair* maupun *overhaul*, sehingga tugas yang diembannya sering tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Maka dari itu perlu adanya inspeksi rutin dan Tindakan tepat waktu yang dapat membantu mencegah kegagalan sistem, komponen dan meningkatkan efisiensi serta mengurangi pengeluaran tak terduga. Wilayah Kalimantan Timur merupakan provinsi yang strategis karena letak geografisnya berada di tengah-tengah Indonesia dan dikenal sebagai *Center of Indonesia*. Pemerintah telah menjatuhkan pilihan pada sebagian wilayah di Kalimantan Timur sebagai lokasi yang paling ideal sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru. Dalam sisi kemaritiman, wilayah Kalimantan Timur berada pada perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Hal ini sangat strategis untuk rantai konektivitas, jalur distribusi dan logistik di nusantara dan transportasi laut internasional.

KESIMPULAN

Wilayah kesatuan Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa perairan, TNI Angkatan Laut memegang peranan yang besar dalam melakukan pengamanan dan penjagaan di wilayah perairan laut, dimana secara universal TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil, peran diplomasi dan peran dukungan. Peran militer dilakukan melalui pengamanan dan penegakan hukum khususnya pada langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan *choke point*, dilakukan operasi rutin KRI selama 24 jam dan 7 hari. Peran Polisionali dilakukan melalui antisipasi Ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional menjadi sebuah tantangan bagi TNI AL sebagai penegak hukum di laut yang dituntut untuk mampu memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal asing yang melintas di wilayah ALKI II. Peran Diplomasi TNI AL dilakukan melalui diplomasi kooperatif, diplomasi maritim dan diplomasi maritim koersif. Peran Dukungan TNI AL dilakukan melalui dukungan pangkalan yang terdiri *Rebase, Replenishment, Repair, Rest and Recreation*.

REFERENSI

- Booth, K. (2014). *Navies and Foreign Policy (Routledge Revivals)*. Routledge.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164.
- Chadhafi, M. I. (2021a). *Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia di Laut Natuna Utara* (Vol. 1). Jejak Pustaka.
- Chadhafi, M. I. (2021b). Peningkatan Kualitas Industri Pertahanan Strategis Guna Membangun Kekuatan Pertahanan Maritim dalam rangka Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 9(2), 207–214.
- Febiana, R., & Burhanuddin, A. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKURITISASI MARITIM PRESIDEN JOKOWI DALAM MENGHADAPI AKTIVITAS ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 16(1), 44–62.
- Gray, C. S., & Sloan, G. (2014). *Geopolitics, geography and strategy*. Routledge.
- Hasan, S., & Haeran, H. (2023). Strategi Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Maritim. *SOSIO DIALEKTIKA*, 8(1), 117–138.
- Herlambang Suryo Putro, S. (2022). Peran Tni AL Dalam Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum Dan Keselamatan Di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara Dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 10(2), 118–131.
- Illmann, E. (2015). *Reasons for relocating capital cities and their implications*.
- Ishenda, D. K., & Guoqing, S. (2019). Determinants in relocation of capital cities. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(4), 200.

- Le Mière, C. (2014). *Maritime diplomacy in the 21st century: Drivers and challenges*. Routledge.
- Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*.
- McNabb, D. E. (2015). *Research methods for political science: Quantitative and qualitative methods*. Routledge.
- Mutia, A. S., Mahroza, J., Sudiarso, A., Harsono, G., Suseto, B., & Sukendro, A. (2024). *MENGAMANKAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA II*.
- Prasetyo, K. A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*.
- Purnama, S. J., & Chotib, C. (2023). Analisis kebijakan publik pemindahan ibu kota negara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 153–166.
- Santyaputra, M. R. A. (2020). *Pertahanan maritim Indonesia era Pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019 terkait dinamika peningkatan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik*.
- Saputra, S. D., & Halkis, M. (2021). Analisis strategi pemindahan ibu kota negara Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi pertahanan (studi kasus upaya pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara). *Ekonomi Pertahanan*, 7(2), 192–220.
- Suproboningrum, L. (2018). Peran Diplomasi Maritim Dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura Untuk Menekan Angka Pembajakan Dan Perompakan Laut Di Selat Malaka. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), 19–38.
- Till, G. (2013). *Seapower: A guide for the twenty-first century*. Routledge.